

PARTISIPASI POLITIK MUSLIMAT NU DALAM PEMILU TAHUN 1955 DAN 1971**Zidny Iman**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: zidnyilman130697@gmail.com

Thomas Nugroho Aji

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Lahirnya Muslimat NU merupakan salah satu bentuk konkrit tumbuhnya kesadaran gerakan perempuan dan reformasi di tubuh NU meskipun menuai konflik di tubuh internal NU serta para kyai. Sebagai organisasi perempuan yang beranggotakan kaum ibu, Muslimat NU telah mengalami modernisasi pemikiran dimana tidak lagi berpandangan bahwa wujud emansipasi adalah persamaan hak dan kewajiban saja melainkan peranan perempuan harus di berikan tingkatan lebih lanjut dan ruang gerak yang cukup untuk mengakomodir perempuan Islam *Ahlussunnah Waljamaah*. Sehingga Muslimat NU turut serta dalam gelanggang Pemilu tahun 1955 dan 1971 untuk menguatkan nota politik NU dan berusaha untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat sebagai anggota DPR dan KONSTITUANTE. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang (1) Bagaimana partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu pada tahun 1955 dan 1971; (2) Bagaimana pandangan pengurus organisasi NU terhadap keterlibatan kader Muslimat NU dalam memperebutkan kursi partai. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Heuristik (pengumpulan sumber) didapatkan peneliti di Perpustakaan Nasional RI, ANRI, Perpustakaan PBNU. Sumber berupa hasil wawancara dilakukan kepada Narasumber yang berkaitan dengan partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu. Kritik sumber dilakukan peneliti agar sumber yang didapatkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sumber interpretasi data. Interpretasi data yang dilakukan berupa analisis sumber yang dikaitkan dengan kondisi pada saat itu, agar penulisan sejarah dapat dilaksanakan dengan baik. Historiografi merupakan metode akhir dalam penelitian, yakni dengan menuliskan hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan. Hasil penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi politik Muslimat NU dalam Pemilu tahun 1955 dan 1971 serta pandangan pengurus organisasi NU terhadap keterlibatan Muslimat NU dalam memperebutkan kusi partai. Peneliti juga menjabarkan bagaimana faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Muslimat NU**Abstract**

The birth of Muslimat NU was one of the concrete forms of growing awareness of the women's movement and reform within the NU despite the internal conflict within the NU and the kyai. As a women's organization whose members are mothers, Muslimat NU has undergone a modernization of thinking which no longer holds that the form of emancipation is equality of rights and obligations but rather the role of women must be given a further level and space sufficient to accommodate Islamic women Ahlussunnah Waljamaah. So that Muslimat NU participated in the 1955 and 1971 Election arena to strengthen NU's political memorandum and try to elect and be elected by the community as members of the DPR and KONSTITUANTE. The formulation of the problems in this study are about (1) How was the political participation of Muslimat NU in the elections in 1955 and 1971; (2) What is the view of the NU organization management towards the involvement of Muslimat NU cadres in fighting for party seats. The method in this research is historical research method. Heuristics (collecting resources) were obtained by researchers at the National Library of Indonesia, ANRI, PBNU Library. The sources in the form of interviews were conducted with resource persons relating to the political participation of Muslimat NU in the election. Sources are criticized by researchers so that sources obtained by researchers can be used as sources of data interpretation. Data interpretation is in the form of source analysis that is related to the conditions at the time, so that the writing of history can be carried out properly. Historiography is the final method in research, namely by writing the results of research in written form. The results of this study are about the form and level of political participation of Muslimat NU in the 1955 and 1971 elections and the views of the NU organization's management on the involvement of Muslimat NU in fighting for party discussions. Researchers also describe how the factors that encourage Muslimat NU's political participation in elections.

Keyword : Political Participation, Muslimat NU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar, NU memiliki pengaruh besar dalam pandangan serta pemikiran masyarakat khususnya masyarakat Islam tradisional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh NU menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dan kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi sejak awal kelahiran, budaya patriarki telah melekat dalam tubuh NU. Hal ini terwujud pada eksistensi kaum laki-laki yang begitu menonjol dibandingkan kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan di dalam NU kurang terangkat.¹ Meskipun telah diselenggarakan kongres perempuan yang digagas oleh Sujatin pada tahun 1928 dan diikuti oleh berbagai perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan seluruh daerah yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan², masih terdapat banyak perempuan yang berargument bahwa tidak adilnya perbandingan antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena perempuan kurang sempurna dalam menjalankan perannya.³ Hal inilah yang disebut sebagai tingkat pertama dalam pergerakan perempuan menurut Soekarno

Pada tahun 1950-an, isu-isu masalah yang dihadapi kaum perempuan muncul lebih kompleks diantaranya adalah persoalan pendidikan, sosial dan keagamaan. Contoh dari permasalahan di atas meliputi persoalan perkawinan di bawah umur, poligami serta termarginalisasinya penjelasan hak-hak perempuan. Dorongan untuk memperjuangkan peranan perempuan ini diwujudkan dalam bentuk sebuah organisasi, diantaranya adalah Puteri Mardika (1912), Perkumpulan Kartini Fonds (1912), Kautamaan Istri (1913), Kerajinan Amai Setia (1914), Pawiyatan Wanito (1915), Wanito Hadi (1915), Purborini (1917), Wanito Susilo (1918). Organisasi yang didirikan bertujuan untuk mewartakan pemikiran-pemikiran kaum perempuan. Sebagian besar organisasi perempuan yang telah ada ingin memberikan pendidikan kepada kaum perempuan, dengan adanya organisasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas mereka. Hal ini dikarenakan pada sekitar tahun 1950-an permasalahan mengenai perempuan dalam organisasi politik atau sosial Islam belum mendapatkan penyelesaian yang baik, banyak

keputusan yang kadang-kadang merugikan kaum perempuan.⁴ Khususnya pada organisasi politik dan sosial Islam perempuan belum diizinkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik padahal perempuan juga berhak duduk di lembaga legislatif, terutama tentang masalah-masalah perkawinan dan hukum keluarga.⁵ Sehingga permasalahan partisipasi perempuan dalam ranah politik ini diakomodir oleh PKI.

Kasus-kasus yang berkembang, yaitu masalah perkawinan di bawah umur, poligami, masalah mengenai kurangnya penjelasan hak-hak perempuan di peradilan agama, tuntutan diadakan kembali angkatan polisi perempuan, serta masalah mengenai keterwakilan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi pembentukan organisasi perempuan di Indonesia mengalami pro kontra. Kesulitan yang dihadapi oleh perempuan pada saat itu kebanyakan didasari oleh pemikiran-pemikiran yang tidak menginginkan perempuan ikut berdiskusi bersama dengan kaum pria. Agama menjadi suatu alasan penyebab adanya subordinasi perempuan dari laki-laki.⁶ Pemikiran tersebut dinyatakan dengan adanya peraturan kyai yang melarang perempuan duduk berembuk, bergaul, dan berunding bersama-sama seperti laki-laki, sedangkan dalam kehidupan organisasi tidak ada perbedaan yang membatasi ruang gerak suatu gender.⁷

Pada Islam dengan gamblang meletakkan dasar ketinggian martabat kaum perempuan memperoleh kedudukan yang sama dengan kaum pria serta memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan amal salih. Hal ini tercermin pada Al-quran surah *An-Nahl* ayat 97 dan sejalan dengan deklarasi PBB pada tahun 1967 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Dengan adanya ratifikasi tersebut maka seharusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan seperti pembatasan memperoleh pendidikan, organisasi, lapangan pekerjaan, keikutsertaan dalam organisasi, politik serta segala bentuk labelling bahwa *wanita iku swargo nunut nroko katut* (Suami masuk surga istri ikut, suami masuk neraka istri juga terbawa) harus di hapuskan.

¹ Abraham Silo Wilar, *NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*, (Bandung: Pyramida Media Utama, 2009), hlm. 32.

² Blackburn dan Susan, *Tinjauan Ulang Kongres Perempuan Pertama*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006),

³ Sukarno. *Sarinah: Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno, 2014), hlm 152

⁴ Saifuddin Zuhri, dkk, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PP.Muslimat NU.2007) hlm 64

⁵ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. 184

⁶ Boerhan D, *Dewan Alam Minangkabau Menolak Kaum Ibu? Isteri Indonesia Dalam Burhamuddin I.& Fathurrahman,O*, (Tentang Perempuan Islam : Wacana dan Gerakan. Jakarta : Gramedia.2004) hlm 1

⁷ Shinta Oktapianti, *Perkembangan Organisasi Muslimat NU di Indonesia Pada Tahun 1952-1984* (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.2015) hlm 1

Lambat laun semangat pergerakan dikalangan perempuan Islam semakin membara karena masalah perempuan tidak mendapatkan perhatian yang layak serta kedudukan perempuan masih di nomor duakan dan dianggap sebagai barang domestik. Mereka berargument bahwa perempuan harus turut andil dalam pengambilan kebijakan sehingga perempuan mendapatkan kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki⁸. Hal inilah yang mendasari keinginan perempuan untuk turut serta dalam percaturan politik pada kontestasi pemilihan anggota legislatif dan konstituante pada pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1971. Sehingga mereka berusaha untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat sebagai wakil rakyat.

Muslimat NU lahir sebagai upaya mengatasi permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di Indonesia, khususnya kaum perempuan muslim dilingkungan organisasi NU. Organisasi ini bertekad untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia yang cerdas, trampil, kompetitif, mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia, khususnya perempuan Islam *Ahlussunnah Waljamaah*.⁹ Lahirnya Muslimat NU merupakan salah satu bentuk konkrit tumbuhnya kesadaran gerakan perempuan dan reformasi di tubuh NU meskipun menuai konflik di tubuh internal NU serta para kyai akan tetapi Mahumudah Mawardi beserta tokoh perempuan yang lain berupaya untuk menjadikan muslimat sebagai badan otonom yang memiliki kepengurusan sendiri di bawah naungan NU.

Hal ini merupakan salah satu wujud terbukanya kran demokrasi dan kesetaraan gender dikarenakan perempuan pada masa itu masih kuat dipengaruhi budaya patriaki. Meskipun kelahiran Muslimat dikatakan cukup lamban dibanding dengan organisasi – organisasi perempuan yang lain seperti GERWANI, hal ini cukup wajar mengingat NU yang kental dengan budaya dan pemikiran tradisional.¹⁰ Sebagai organisasi perempuan yang beranggotakan kaum ibu, Muslimat NU sudah tidak lagi berpandangan bahwa wujud emansipasi adalah persamaan hak dan kewajiban saja melainkan peranan perempuan harus di berikan tingkatan lebih lanjut dan ruang gerak yang cukup untuk mengakomodir perempuan Islam *Ahlussunnah Waljamaah*. Pada kongres NU yang ke 19 tahun 1952 di Palembang Muslimat NU dijadikan badan otonom bersamaan dengan diresmikannya NU sebagai partai politik. Hasil kongres pertama ke XX di Surabaya setelah Muslimat NU resmi menjadi badan otonom memutuskan kepada PBNU (LAPUNU) agar kader Muslimat NU dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-

DPRD-KONSTITUANTE sebagai calon prioritas dari Partai NU. Sebagai organisasi perempuan di bawah naungan NU hal ini otomatis menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu badan yang turut serta membantu dan menguatkan Nota politik NU pada kontestasi Pemilu tahun 1955 dan 1971.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti tentang “**Partisipasi Politik Muslimat NU Dalam Pemilu Tahun 1955 - 1971**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah (1) Bagaimana partisipasi politik Muslimat NU dalam Pemilu tahun 1955 dan 1971? (2) Bagaimana pandangan pengurus organisasi NU terhadap keterlibatan kader Muslimat NU dalam memperebutkan kursi partai?

B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai partisipasi politik Muslimat NU dalam Pemilu tahun 1955 dan 1971 ini mampu menambah wawasan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan menambah khazanah historiografi tentang peran organisasi perempuan dalam ranah politik khususnya bagi warga Nahdliyin dan masyarakat luas pada umumnya.

METODE

PARTISIPASI POLITIK MUSLIMAT NU DALAM PEMILU TAHUN 1955 DAN 1971

A. Aktif Dalam Kampanye Dengan Saluran Keagamaan dan Kegiatan Amal

Pada Pemilu tahun 1955 Muslimat NU turut aktif sebagai juru kampanye Partai NU.¹¹ Kegiatan dakwah dan pengajian yang menjadi kegiatan rutin digunakan Muslimat NU sebagai sarana untuk menaikkan elektabilitas partai NU.¹² Dengan semboyan perjuangannya yang diambil dari hadist bahwa “wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik negara pun menjadi baik, dan apabila wanita rusak negarapun rusak”.¹³ Adanya dua jenis pengajian yang diselenggarakan oleh Muslimat NU dengan sasaran jamaah pengajian yang berbeda menunjukkan adanya upaya untuk menysasar pemilih internal NU dan eksternal NU. Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin sehingga sangat mudah

⁸ Saifuddin Zuhri, dkk, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PP.Muslimat NU.2007) hlm 64

⁹ www. Muslimat nu.or.id

¹⁰ Shinta Oktapianti, *Perkembangan Organisasi Muslimat NU di Indonesia Pada Tahun 1952-1984* (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.2015) hlm 2

¹¹ Ny.Syaifuddin Zuhri , dkk, *op.cit.*, hlm. 65

¹² Lailatus Syukriyah, “Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)”, AVATAR: eJournal Pendidikan Sejarah, Volume 4, No.3, Oktober 2016, hlm. 618

¹³ Amanat harlah ke xxv oleh ibu Mahmudah Wawardi, Syaifuddin Zuhri , dkk, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*. (Jakarta: PP Muslimat NU,1979) hlm. 170

bagi kader-kader Muslimat untuk meminta dukungan khalayak ramai baik internal NU maupun masyarakat umum secara tersirat dalam pemilu 1955 maupun 1971 melalui kegiatan-kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh Muslimat NU.¹⁴ Pada tahun 1962 Muslimat NU, mulai mengumpulkan para muballighoh (perempuan penyiara agama) di pusat dan daerah. Hal ini untuk membantu dalam kampanye partai NU dalam pemilu yang selanjutnya. Penyisipan dukungan dalam kegiatan pengajian dinilai cukup efektif karena banyaknya warga Indonesia yang menganut Islam tradisional. Pengajian ini diselingi doktrin-doktrin bahwa dengan memilih NU maka mereka akan masuk surga dan yang mencoblos gambar NU berarti telah menjalankan amal saleh sebagai bukti ikut berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*) serta menggencarkan isu-isu downgrade anti Masyumi sehingga pilihan hanya jatuh pada NU dan PNI.¹⁵

Tema-tema yang disampaikan Muslimat NU dalam kampanyenya melalui kegiatan dakwah tidak hanya seputar ceramah masalah-masalah keagamaan, namun juga masalah-masalah kemasyarakatan dan masalah yang berkaitan tentang perempuan seperti bahaya kemaksiatan, usaha-usaha penurunan martabat kaum wanita, perjudian, dan perbuatan amoral lainnya.¹⁶

Kampanye dengan kegiatan amal dilakukan dengan melakukan khitanan umum, penggalangan dana untuk fakir miskin dan korban bencana alam, mengadakan kedai nasi murah, melakukan kerja bhakti bersih desa, reboisasi dan memberikan bantuan peminjaman barang untuk hajatan.¹⁷ Berdasarkan hasil peninjauan PP LAPUNU terhadap PEMILU DPR dan KONSTITUANTE tahun 1955 disebutkan bahwa "*kita berusaha menyediakan alat-alat dapur untuk keperluan orang desa yang mempunyai hajatan (mantu, khitanan, dll) yang diurus oleh Muslimat NU. Dengan alat-alat inilah insyaallah dimana-mana tak akan kesepian anggota NU yang berarti dimana akan ada pemilihan disitulah insyaallah NU akan mendapat kemenangan. Dengan cara itulah kita akan dapat mengikat orang perempuan di desa-desa dengan baik*"¹⁸

B. Kaderisasi Dalam Rangka Memperkuat Basis Relawan

Pada pemilu pertama tahun 1955 berdasarkan surat dari panitia kursus kader pemilihan umum bagian pengajaran mulai tgl 21 Februari – 6 Maret 1954 diadakan kursus pemilu tentang pelajaran-pelajaran/penjelasan-penjelasan tentang soal-soal yang berhubungan dengan pemilihan umum yang diikuti

oleh delegasi dari Muslimat NU, Fatayat NU, dan G.P Anshor. Pelajaran-pelajaran tersebut meliputi, pedoman berkampanye, undang-undang pemilu, kepartaian serta program politik dan perjuangan partai di perwakilan-perwakilan.¹⁹ Adapun kursus kepemimpinan yang lainnya diadakan di Semarang tahun 1953 dan Jakarta tahun 1955.²⁰ Tujuan adanya kursus kepemimpinan yaitu untuk merekrut anggota kursus tersebut menjadi anggota dari salah satu banom NU. Pada pemilu tahun 1971, cara ini diterapkan kembali untuk mendulang suara Partai NU.

Berdasarkan Kongres Muslimat NU ke 7 Lampiran PP Muslimat NU bahwa salah satu program periode 1963-1965 adalah mengadakan kursus kader Muslimat/Fatayat dengan pokok pelajaran indoktrinasi *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dengan dilengkapi bahan-bahan dari partai NU dan Muslimat/Fatayat missal AD/ART serta menjalankan program partai berupa indoktrinasi Manipol dengan tujuan bahan pokok.²¹ Pada tahun 1962, Muslimat NU bersama Fatayat NU mengadakan kursus kader yang dilakukan dengan pokok pelajarannya indoktrinasi *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan dilengkapi bahan-bahan dari PBNU, Muslimat NU dan Fatayat.²²

C. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (Sosialisasi Program Politik)

Pada pemilu tahun 1955 Muslimat NU juga turut andil dalam mengawal daftar pemilih sementara. Berdasarkan surat No 1/Lp/NU/53 tentang pendaftaran anggota serta pengikut-pengikutnya diluar anggota untuk pemilihan umum yang akan datang, LAPUNU cabang Sidoarjo menghimbau agar pengurus-pengurus partai NU seperti Muslimat perlu sekali mengadakan pendaftaran pemilih-pemilih atas usaha sendiri. Pendaftaran ini dimaksudkan sebagai pengawasan dan *check and balance* supaya anggota-anggota dan calon pemilih partai NU masuk kedalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu yang akan datang.²³ Muslimat NU juga turut mensosialisasikan Program Perjuangan NU kepada pemilih.

D. Upaya Penertiban Bidang Administrasi

Berdasarkan hasil kongres Muslimat NU ke IX, prasarana yang utama menghadapi Pemilu ialah adanya organisasi yang baik dan teratur serta disiplin organisasi.²⁴ Diharapkan upaya penertiban administrasi ini dapat mempermudah proses rekrutmen relawan (kader) sebagai basis masa dan proses

¹⁴ Risalah Lapunu, *Kampanye Gerakan Menuju Kemenangan*, (Jakarta: Lajanan Pemilihan Umum Pusat Partai NU, 1971), hlm 3

¹⁵ Greag Fealy, *op.cit.*, hlm 190

¹⁶ Risalah lapunu, *loc.cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm 26

¹⁸ hasil peninjauan PP LAPUNU terhadap PEMILU DPR dan KONSTITUANTE

¹⁹ berdasarkan surat dari panitia kursus kader pemilihan

umum bagian pengajaran mulai tgl 21 Feb – 6 Maret 1954

²⁰ Erni Isnaeni, "Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia Dalam Tradisi NU", Bandung: Religious, Jurnal Agama dan Lintas Budaya 2, 1 Maret 2017, hlm. 156

²¹ Ny.Syaifuddin Zuhri, dkk, *op.cit.*, hlm. 87

²² *Ibid*, hlm 87

²³ Arsip surat LAPUNU Sidoarjo No 1/Lp/NU/53 tgl 17 Oktober 1953

²⁴ Ny.Syaifuddin Zuhri, dkk, *op.cit.*, hlm. 104

pendataan pemilih sementara Partai NU yang pasti dan berubah.

E. Keluarnya Fatwa Tentang Pemilu dan Dampak Pencalonan Anggota Muslimat NU Dalam Pemilihan DPR dan Konstituante

Pada kongres NU ke XX di Surabaya tahun 1954 memutuskan memajukan pernyataan kepada PBNU (LAPUNU) agar Muslimat NU dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-DPRD – KONSTITUANTE sebagai calon prioritas.²⁵ Terdapat pro kontra terkait keterlibatan perempuan dalam ranah politik banyak ulama yang menentang masuknya Muslimat NU kedalam politik dengan alasan syari akan tetapi prokontra tersebut selesai didalam rapat internal NU dengan adanya dukungan dari Kyai Abdul wahab dan idham cholid serta keluarnya fatwa tentang hukum wanita menjadi anggota DPR/DPRD.

Sosialisasi tentang fatwa ini digencarkan Muslimat NU ke pemilih-pemilih perempuan baik internal maupun eksternal NU.²⁶ Kongres ke IX pada tanggal 20-26 Oktober 1967 di Surabaya menerangkan tentang strategi dan target pemilu. Target Muslimat NU dalam pemilu antara lain; 1. *Amal ma'ruf Nahi Munkar*; 2. Ikut memegang jabatan penting dalam pemerintahan (dalam lembaga eksekutif dan Legislatif) melalui jalan yang sah; 3. Berusaha agar program partai menjadi program Nasional, melalui jalan yang sah.²⁷ Adanya perwakilan Muslimat NU yang ikut berpartisipasi dalam kancah politik menjadi calon anggota DPR dan anggota Konstituante pada pemilu tahun 1955 juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya suara partai NU.

F. Program *Home Industry* Sebagai Sumber Pendanaan Kampanye

Berdasarkan kongres ke IX pada tanggal 20-26 Oktober 1967 di Surabaya sampai dengan 5-11 Juni 1979 di Semarang juga membahas masalah pokok dalam pemilu. Program yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan pemilu tidak tergantung akan adanya kekuatan material.²⁸ Muslimat NU juga berupaya untuk meningkatkan Industri rumah tangga (*Home Industry*) sebagai sumber pendanaan kampanye

G. Aktif Dalam Lajnah Pemilihan Umum

Pada pemilu pertama tahun 1955 berdasarkan surat dari Madjelis Konsul Pengurus Besar Partai NU kepada Madjelis konsul PP Muslimat tanggal 17 Maret 1955, Muslimat NU dihimbau untuk mengisi tempat di LAPUNU wilayah. Pada pemilu tahun 1971 Muslimat NU juga kembali diikutsertakan dalam LAPUNU

berdasarkan instruksi dari PP LAPUNU tanggal 12 Desember 1964. Muslimat NU turut mengawal penyempurnaan organ partai didaerah masing-masing hingga disetiap daerah terdapat ranting NU dan memperkuat ideology anggota partai sehingga setiap anggota partai memahami tentang azas dan tujuan partai NU. Pada pemilu tahun 1971 ini salah satu kader Muslimat NU yakni Ny. H.S.A Wachid Hasyim turut serta menjadi Wakil Ketua Pengurus Lajnah Pemilihan Umum (LAPUNU Pusat) dan ikut menentukan garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum²⁹.

H. Penggunaan Media Duta Masyarakat Sebagai Sarana Implementasi Pemikiran Politik Muslimat NU

Muslimat NU memanfaatkan salah satu media NU yaitu Duta Masyarakat (1954), hal ini untuk mengutarakan pandangan pandangnya mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia dan keterlibatan perempuan dalam partai NU³⁰. Artikel-artikel Aisyah Dachlan secara tajam membahas masalah ini dan memprotes “kata-kata beracun” dan pernyataan menyakitkan bahwa perempuan tidak tahu apa-apa yang dilontarkan kaum laki-laki. Ia mengemukakan bahwa banyak perempuan yang berminat dan ingin melakukan aktivitas di luar rumah namun terhalang oleh tekanan suaminya. Tekanan internal yang menyedihkan untuk mengurus anak dan rumah menyebabkan hampir semua aspirasi perempuan kandas. Aisyah Dachlan selanjutnya mengatakan bahwa didalam Islam dan NU perempuan dan laki-laki punya derajat yang sama.³¹

I. Prosentase Kader Muslimat NU Yang Terpilih Dalam Konstituante dan DPR

Hasil pemilu pertama tahun 1955 dari total 45 orang anggota Partai NU terpilih, jumlah Muslimat NU yang terpilih sebagai anggota DPR sebanyak 10% dari jumlah perolehan kursi DPR Partai NU. Pada pemilu tahun 1971 Partai NU memperoleh 58 Kursi. Dari 460 orang anggota DPR RI terpilih terdapat 34 orang anggota DPR RI berjenis kelamin perempuan, jumlah perwakilan Muslimat NU yang terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 1971 berkurang 20% dari pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955.

Sebab-sebab turunnya jumlah wakil dari Muslimat NU pada pemilu Tahun 1971 ini disebabkan oleh mulai adanya kontrol dari pemerintah dengan adanya Permendagri No 12 tahun 1969 tentang larangan PNS terlibat aktif dalam politik. Hal ini berdampak pada hasil perhitungan suara pada pemilu tahun 1971 dari 34 anggota DPR RI wanita yang terpilih 73,52% merupakan anggota DPR dari

²⁵ Ny.Syaifuddin Zuhri , dkk, op.cit., hlm. 64

²⁶ Wawancara ibu Faridah Mawardi putri dari Nyai Mahmudah Mawardi, tanggal 16 November 2019

²⁷ Ny.Syaifuddin Zuhri , dkk, loc.cit.

²⁸ Ibid.

²⁹ Susunan pengurus LAPUNU Pusat 1971

³⁰ Ibid., hlm. 87.

³¹ Harian Duta Masyarakat tanggal 24 - 26 September 1955

Golkar.³² Selain itu, dalam surat PBNU kepada pengurus cabang partai NU tanggal 26 juni 1972 terjadi masalah pemberhentian (skorsing) guru-guru akibat pra-pemilu³³.

KIPRAH MUSLIMAT NU DALAM POLITIK TAHUN 1955 DAN 1971

A. Pro Kontra Pengurus NU Terkait Keterlibatan Kader Muslimat NU Sebagai Anggota DPR dan Konstituante

Pada awalnya terjadi pro kontra dari para kyai terkait keterlibatan perempuan dalam ranah politik khususnya dalam memperebutkan kursi partai. Reaksi dari para kyai yang konservatif, memprotes bahwa perempuan tidak mungkin bisa menjadi politisi yang efektif karena mereka akan menghadapi bahaya moral dan fisik serta mengabaikan tugas utama kepada keluarganya. Para kyai juga menegaskan bahwa calon legislatif perempuan harus melakukan kampanye keliling ke daerah-daerah, sementara tidak mudah untuk mendapatkan sarana penginapan yang layak untuk mereka dan membatasi pergaulan sebagai ibu rumah tangga yang baik. Kalau terpilih, seorang politisi perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta, yang mengharuskan mereka untuk tinggal terpisah dengan keluarganya atau seluruh keluarganya harus ikut pindah ke ibu kota.³⁴

Salah satu Kyai yang cukup moderat adalah Kyai Wahab Hasbullah. Kyai Wahab Hasbullah merupakan tokoh senior dan juga *Rais 'Aam* PBNU yang memiliki pandangan moderat terhadap berbagai permasalahan terkait keperempuanan. Di tengah-tengah perdebatan paham terhadap soal perempuan Kyai Wahab Hasbullah mampu memberikan pengaruh kuat dan menghegemoni pemikiran kyai-kyai NU yang masih konservatif untuk menerima Muslimat NU untuk terlibat kedalam ranah politik.

B. Elektabilitas Muslimat NU Dalam Memperebutkan Kursi Partai

Pada tahun-tahun awal sebelum diperbolehkannya anggota Muslimat NU untuk turut serta dalam kontestasi pemilu, Muslimat NU belum disadari sebagai bagian dari mesin politik Partai NU dan baru sebatas pendekatan secara kultural. Sebelum NU menjadi partai, Muslimat NU sudah menjalankan program organisasinya dibidang keagamaan dan kegiatan sosial. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu di setiap daerah dari pusat hingga ke ranting, sehingga

sangat mudah bagi partai NU khususnya kader-kader Muslimat NU untuk menyisipkan kampanye-kampanye pemilu pada kegiatan keagamaan maupun sosial.

Pandangan Muslimat NU dalam menyoroti masalah-masalah keperempuanan sebagai masalah nasional yang akut menjadi salah satu point plus tingginya elektabilitas Muslimat NU baik di pusat hingga ke daerah-daerah.³⁵ Pada Pemilu tahun 1955 jumlah suara yang diperoleh Partai NU sebesar 6.955.141 suara. Berdasarkan Surat Lajnah Pemilihan Umum Pusat kepada Muslimat NU tanggal bahwa dari 6.955.141 suara yang dibulatkan menjadi 7.000.000 suara, 60% suara Partai NU berasal dari Muslimat NU sebagai basis suara kaum perempuan. Sedangkan jumlah suara kaum laki-laki lebih sedikit dari jumlah suara Muslimat NU. Presentase suara kaum laki-laki mencapai 40% dari jumlah suara Partai NU.

C. Motivasi Kader Muslimat NU Dalam Memperebutkan Kursi Partai

Motif utama atau motif secara umum kader Muslimat NU dalam memperebutkan kursi partai dilandasi oleh semangat *Amal Makruf Nahi Munkar*.³⁶ Semangat *Amal Makruf Nahi Munkar* merupakan kekhususan bagi umat islam untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Selain itu juga terdapat motif khusus yang mendasari kiprah Muslimat NU dalam kegiatan politik, yakni memiliki tujuan sosial untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan membawa perempuan Islam Indonesia kearah kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara.³⁷ Muslimat NU menyoroti berbagai masalah sosial fundamental yang sering dihadapi kaum perempuan. Masalah-masalah tersebut seperti masalah perkawinan anak dibawah umur karena faktor ekonomi, serta proses peradilan dalam kasus perceraian yang dinilai kurang melindungi hak-hak kaum perempuan.³⁸ Sehingga Muslimat NU berusaha untuk mengartikulasikan peranannya dalam politik praktis untuk membawa kesatuan gerak dan langkah kaum perempuan serta mempertinggi kecakapan kaum perempuan Islam untuk memperkuat rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara.

Selain motif utama tersebut, pada pemilu tahun 1955 ada upaya dari Muslimat NU untuk membendung kekuatan Gerwani sebagai underbow PKI yang pada saat itu gerakannya sangat masif. Hal ini dikarenakan menurut pandangan Islam khususnya Muslimat NU, ajaran-ajaran PKI yang berhaluan komunis tidak sesuai

³² Surat PP MUSLIMAT NU tentang pemberitahuan hasil pemilu tanggal 23 oktober 1971

³³ Surat PBNU kepada pengurus cabang partai NU tanggal 26 juni 1972

³⁴ Wawancara dengan Aisjah Dahlan, 17 Februari 1992; dan Asmah syahrini, 21 Februari dan 9 Maret 1992. Tidak seorangpun anggota muslimat yang dapat mengingat kyai yang menolak caleg perempuan ketika itu walaupun ada kemungkinan orang itu adalah Bisri Syansuri yang terkenal konservatif mengenai

masalah gender. (dalam Greag Fealy hlm 185)

³⁵ Saifuddin Zuhri, dkk, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PP.Muslimat NU.2007) hlm 63

³⁶ Hasil Kongres Muslimat NU ke V tahun 1954 dan kongres Muslimat NU ke IX tahun 1967

³⁷ Wawancara dengan Faridah Mawardi, 16 November 2019 dan AD/ART Muslimat NU tahun 1962

³⁸ Saifullah Ma'shum dan Ali Zawawi, dkk., editor., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat, hlm. 79

dengan hukum Islam. Adanya upaya untuk membendung PKI ini sudah ada sejak Pemilu tahun 1955. Dalam notulensi rapat, Ny. Mahmudah Mawardi mengemukakan bahwa beliau sepakat untuk membendung PKI dan memikirkan cara untuk membendung ajaran komunis.³⁹ Sehingga salah satu cara agar Muslimat NU dapat turut serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan hukum Islam adalah dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan Konstituante.

Salah satu contoh konkrit perjuangan Muslimat NU di ranah legislatif dalam rangka memperjuangkan emansipasi perempuan salah satunya dengan pengawalan RUU Perkawinan. Pada tahun 1957, Ny. Sumari dkk mengajukan RUU Perkawinan ke DPR. RUU yang diajukan oleh Ny. Sumari dkk dinilai oleh fraksi NU secara keseluruhan menyimpang dari hukum-hukum perkawinan Islam. Fraksi yang menolak antara lain Fraksi NU dengan juru bicara Ny. H. Mahmudah Mawardi dan Masyumi dengan juru bicara Ny. Sunarjo Mangunpuspito, sedangkan fraksi yang mendukung RUU Perkawinan tersebut adalah fraksi PKI yang tampil dengan juru bicaranya yakni Umi Sarjono. Jumlah anggota perempuan dari fraksi NU sebanyak 5 orang, fraksi Masyumi 3 orang, fraksi PNI 5 orang dan fraksi PKI 5 orang. Pergolakan organisasi perempuan terkait pro kontra RUU Perkawinan tersebut terus bergulir hingga pada akhirnya sidang memutuskan bahwa RUU Perkawinan yang diusulkan oleh Ny. Sumari dkk ditolak.⁴⁰

Selain motif utama dan khusus juga terdapat motif pribadi yang mendorong kader Muslimat NU untuk turut serta dalam kontestasi pemilu tahun 1955 dan tahun 1971. Salah satunya adalah motif yang menginspirasi Mahmudah Mawardi yang menjabat sebagai ketua umum Muslimat NU tahun 1950-1972 untuk turut andil dalam bidang politik khususnya dalam kontestasi pemilu. Mahmudah Mawardi ingin berjuang untuk kesejahteraan umat khususnya kesejahteraan kaum perempuan. Selain hal tersebut sebagai ketua umum Muslimat NU tahun 1950-1972 Mahmudah Mawardi menjadikan ranah politik sebagai ranah bagi perkembangan dan kemajuan Muslimat NU.⁴¹

Mahmudah Mawardi terinspirasi oleh salah satu tokoh NU yakni Kyai Idham Chalid. Idham Chalid adalah orang pertama dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan tertinggi di pemerintahan. Beliau berkali-kali jadi wakil perdana menteri (waperdam). Kyai Idham Chalid merupakan seorang politisi moderat yang luwes dan lunak serta lebih suka mengikuti arus tanpa hanyut

ke dalamnya.⁴² Beliau berpandangan bahwa demokrasi sudah sejak lama hidup di bumi sejak zaman keemasan Yunani Kuno akan tetapi dalam praktiknya sangat jauh dari kesempurnaan. Karena diskriminasi hak-hak manusia dianggap sesuatu yang wajar serta disebabkan anak-anak dan para wanita tidak memiliki hak politik.⁴³ Keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi. Sehingga perlu adanya upaya untuk meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik.

D. Tingkat Partisipasi Politik Muslimat NU Dalam Pemilu Tahun 1955 dan Tahun 1971

Dalam pemilu tahun 1955 dan 1971 tingkat partisipasi politik Muslimat NU termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif. Pada tahun 1955 prosentase partisipasi politik Muslimat NU sebesar 60% berdasarkan jumlah pemilih perempuan dari partai NU.⁴⁴ Sedangkan pada tahun 1971 prosentase partisipasi politik Muslimat NU sebesar 11,7% berdasarkan jumlah anggota DPR perempuan terpilih.⁴⁵ Penggolongan partisipasi politik Muslimat NU sebagai kategori partisipasi politik aktif didasari oleh kegiatan yang dilakukan Muslimat NU dalam pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1971 yakni aktif dalam kegiatan kampanye, melakukan kaderisasi, mengawal pendaftaran daftar pemilih, turut serta berkontestasi dalam pencalonan anggota DPR dan Konstituante, serta mengajukan usul mengenai suatu kebijakan tentang masalah perkawinan dan masalah keperempuanan.

Apabila dianalisis dengan menggunakan hierarki partisipasi politik Milbrath dan Goel, Muslimat NU termasuk dalam kategori Gladiator atau golongan yang aktif dalam proses politik. Indikator kategorisasi ini yakni : 1. Muslimat NU berperan sebagai komunikator melalui pengawalan isu-isu keperempuanan khususnya masalah tentang perkawinan dan hak-hak perempuan dalam peradilan; 2. Muslimat NU turut serta terjun ke masyarakat, mengadakan kontak dengan masyarakat dalam program-program sosial; 3. Dalam kegiatan kampanye, Muslimat NU turut serta dalam gelanggang pemilu sebagai juru-juru kampanye handal dari Partai NU. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muslimat NU dalam Pemilu inilah yang menjadi dasar atau indikator kategorisasi Muslimat NU berpartisipasi secara aktif dalam pemilu tahun 1955 maupun pemilu tahun 1971.

PENUTUP

Ready Reference, Encyclopedia Britania Inc. (Chicago: University of Chicago Press, 1988), Hlm. 5. Dikutip dari Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), hlm. 71

⁴⁴ Arsip Lajnah Pemilihan Umum kepada Muslimat NU, tgl 9 Oktober 1967

⁴⁵ Ibid., tgl 23 Oktober 1971

³⁹ Arsip Notulensi Rapat Paparan pada Konferensi LAPUNU se-Indonesia

⁴⁰ Saifuddin Zuhri, dkk, *op.cit.*, hlm 70

⁴¹ Wawancara Faridah Mawardi, tanggal 16 November 2019

⁴² Tim penulis tempo, apa dan siapa sejumlah orang Indonesia (Jakarta:Grafiti, 1981) hlm 99

⁴³ The New Encyclopedia Britanica, vol 4, Micropedia ,

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa Muslimat NU pada pemilu tahun 1955 dan 1971 berpartisipasi politik secara aktif. Pada saat NU berubah haluan dari organisasi sosial keagamaan menjadi Partai Politik, Muslimat NU secara organisasi turut serta menguatkan nota politik NU sebagai sayap politik Partai NU menyesuaikan dengan program kerja pada AD/ART Partai NU.

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan dengan menggunakan teori partisipasi politik, gender, feminisme dan teori kelompok kepentingan sebagai unit analisa maka penulis mendapat temuan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Rumusan masalah yang ditentukan ada dua yakni bagaimana partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu pada tahun 1955 dan 1971, dan bagaimana pandangan pengurus organisasi NU terhadap keterlibatan kader Muslimat NU dalam memperebutkan kursi partai. Sejarah historis lahirnya Muslimat NU sampai kiprahnya termuat didalam Bab II, sedangkan wujud partisipasi politik Muslimat NU dan pandangan pengurus organisasi NU terkait keterlibatan kader Muslimat NU dalam memperebutkan kursi partai termuat di dalam Bab III sampai Bab IV. Untuk mengetahui partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu tahun 1955 dan 1971 penulis menganalisis sumber arsip dan wawancara dengan teori yang digunakan.

Beberapa fakta yang telah dijabarkan di Bab pembahasan maka dapat diketahui bahwa Muslimat NU sebagai badan otonom berperan aktif sebagai sayap politik partai NU pada pemilu tahun 1955 dan 1971. Wujud partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu meliputi aktif dalam kampanye dengan saluran keagamaan dan kegiatan amal, kaderisasi dalam rangka memperkuat basis relawan, turut serta mengawal daftar pemilih sementara, mengawal isu-isu sosial dan keberempuan, mengembangkan program *home industry* sebagai sumber pendanaan kampanye serta aktif dalam Lajnah Pemilihan Umum (LAPUNU).

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Muslimat NU dalam pemilu 1955 dan 1971 berada pada tingkatan gladiator. Prosentase jumlah kader Muslimat NU yang terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 1955 yakni 10% dari jumlah kursi Partai NU. Sedangkan pada Pemilu tahun 1971 jumlah kader Muslimat NU yang terpilih sebagai anggota DPR turun sebesar 20% dari Pemilu tahun 1955. Hal ini dikarenakan adanya intervensi pemerintah setelah keluarnya Permendagri no 12 tahun 1952 tentang larangan PNS terlibat aktif dalam politik serta adanya surat dari Partai NU terkait masalah skorsing guru akibat pra pemilu. Selain itu faktor yang mendasari tingginya partisipasi politik Muslimat NU dalam

pemilu tahun 1955 dan 1971 adalah adanya modernisasi, pengaruh kaum intelektual yang berpikiran moderat seperti Kyai Wahab Hasbullah dan Kyai Idham Chalid, serta konflik diantara kelompok politik yakni pecahnya NU dan Masyumi. Keterlibatan Muslimat NU dalam partisipasi politik khususnya pemilu tidak serta merta mendapat respon positif. Pada awalnya terjadi pro kontra dari para kyai terkait keterlibatan Muslimat NU dalam ranah politik. Akan tetapi salah satu kyai yang moderat yakni Kyai Wahab Hasbullah berpandangan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama termasuk dalam ranah politik. Pandangan Kyai Wahab Hasbullah ini mampu menghegemoni para kyai yang konservatif terkait keterlibatan Muslimat NU dalam ranah politik.

B. Saran

Berdasar temuan-temuan yang didapat dari penelitian ini maka diharapkan nantinya mampu menjadi bahan kajian dalam pembelajaran sejarah. Melalui penelitian ini didapatkan informasi-informasi baru mengenai partisipasi politik di Indonesia. Partisipasi politik yang dimaksud tentunya mengenai partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu tahun 1955 dan 1971. Tentunya penelitian ini mampu dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia.

Hasil penelitian mengenai partisipasi politik Muslimat NU dalam pemilu tahun 1955 dan 1971 mampu menambah wawasan mengenai bagaimana partisipasi politik perempuan khususnya Muslimat NU dalam pemilu pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Pada dunia pendidikan penelitian ini juga berguna sebagai bahan ajar dalam menyampaikan materi. Seperti pada pelajaran Sejarah di jenjang SMA mengenai masa Orde Lama dan Orde Baru, melalui penelitian ini peserta didik dapat dikenalkan mengenai proses demokrasi khususnya sejarah tentang partisipasi politik perempuan yang dilatar belakangi oleh bermacam-macam motivasi dan pro kontra sebagai bentuk emansipasi perempuan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini mampu mengajarkan kepada peserta didik bahwa salah satu abentuk dari keadilan Hak Asasi Manusia adalah kesetaraan gender yang diwujudkan dalam partisipasi politik perempuan khususnya pada pemilu tahun 1955 dan 1971, meskipun keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik khususnya pencalonan anggota DPR dan Konstituante mengalami pro kontra akan tetapi modernisasi ini mampu membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila di bangku perkuliahan, dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi maka akan didapat pengetahuan mengenai alasan mengapa pemerintah menentukan syarat keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30%. Sehingga melalui beberapa manfaat yang

dijelaskan besar harapan penulis jika penelitian ini diterbitkan menjadi sebuah buku yang dapat dikonsumsi oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond, Gabriel. 2000. *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Budiarjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jogjakarta : PT Penerbit ombak.
- Budiharjo. 1980. *The Cmparative Study of Politic*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Inc.
- Cavallaro, Dani. 2004. *French Feminist theory*. Continuum :An Introduction
- D, Boerhan . 2004. *Dewan Alam Minangkabau Menolak Kaum Iblue? Isteri Indonesia Dalam Burhanuddin I.& Fathurrahman,O, Tentang Perempuan Islam : Wacana dan Gerakan*. Jakarta : Gramedia.
- Douglas, Jr. A. Hibb. 1978. *Mass Political Violence*. New York: Wiley
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Fadeli, Soeleiman dan Subhan, Mohammad. 2007. *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. aSurabaya : Khalista dan LTN NU Jawa Timur.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gotschalk, Louis. 1973. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Depok, Universitas Indonesia.
- Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya, UNESA University. Press
- Masoed, Mochtar, Colin Mac Andrews. 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Milbarth, Lester dan M.L. Goel. 1997. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing.
- Muniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender*. Yogyakarta : Yayasan Indonesia Tera.
- Pranoto. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Rush, Michael dan Althof, Philip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukarno. 2014. *Sarinah: Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik* . Jakarta : Gramedia Widya Sarana.
- Susan dan Blacburn. 2009. *Tinjauan Ulang Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Suyando, Bagong dan Narwoko, J.Dwi. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar&Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wilar, Abraham Silo. 2009. *NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*. Bandung: Pyramida Media Utama.
- Zen, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhri, Saifuddin dkk. 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PP. Muslimat NU
- Zuhri, Saifuddin dkk. 2007. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jakarta: PP.Muslimat NU. Jakarta: PP.Muslimat NU.
- Zuhriah, Erfaniah. 2012. *Kekeerasan suami terhadap istri dalam wacana hak asasi manusia*. UIN Malang

Internet

- www. Muslimat nu.or.id diakses tanggal 10 Agustus 2019
- www.NU.online.com diakses tanggal 10 Agustus 2019

Skripsi

- Samsuniyah. *Muslimat Nahdlatul Ulama Pada Masa Kepemimpinan Mahmudah Mawardi Tahun 1950-1979*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga
- Nusroh Diana. *Kelahiran Muslimat NU*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga
- Syukriyah,Lailatus. *Muslimat NU di Indonesia tahun 1946-1955*. Skripsi. Surabaya. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
- Oktapianti,Shinta. *Perkembangan Organisasi Muslimat NU di Indonesia Pada Tahun 1952-1984*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mundlir, Abdul. *Peran Politik NU tahun 1952 -1955*. Skripsi. Surabaya. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
- Haris, Munawir. *Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah*. Skripsi. Sorong, Papua Barat. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sorong.

Arsip

- Harian Duta Masyarakat tanggal 22 Juli 1968 tentang Kaum Wanita Jangan Hanya Pandai Bersolek Saja
- Harian Duta Masyarakat tanggal 6 Juli 1968 tentang Muslimat NU Desak Adanya UU Perkawinan

Harian Duta Masyarakat tanggal 6 September 1968
tentang Kursus Kader Muballighat Muslimat
NU

Harian Duta Masyarakat tanggal 25 Juli 1966 tentang
Islam Menjamin Hak-Hak Wanita

Harian Duta Masyarakat tanggal 29 Juli 1966 tentang
Wanita dan Pria Punya Tanggung Jawab yang
Sama

Harian Duta Masyarakat tanggal 4 April 1966 tentang
Muslimat NU Sumbang Korban Banjir

Harian Duta Masyarakat tanggal 25 Juli 1966 tentang
Poligami Menurut Syariat Islam

AD/ART Muslimat NU Tahun 1962

Surat PP Muslimat NU Tanggal 23 Oktober 1971
tentang pemberitahuan hasil Pemilu 1971

Surat PP LAPUNU Tanggal 9 Oktober 1967 tentang
hasil Pemilu 1955

Surat PP LAPUNU tentang Susunan Pengurus
LAPUNU Pusat 1971

Surat PP LAPUNU Tanggal 16 Juni 1958

Surat PP LAPUNU Tanggal 12 Desember 1954
tentang diikuti sertakannya Muslimat NU dalam
LAPUNU

Surat PP Partai NU Tanggal 23 Februari 1954 tentang
kursus kader

Surat PP Partai NU Tanggal 17 Maret 1955 tentang
putusan penyusunan LAPUNU Wilayah

Surat PP Partai NU Tanggal 26 Juni 1972 tentang
pemberhentian guru akibat pra pemilu

Arsip Daftar Calon Sementara DPR Tahun 1971

